

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu hak yang dimiliki oleh semua manusia ialah pendidikan, seperti isi Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pada bulan Juni 2015, pemerintah mulai melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, untuk menempuh jenjang SD, SMP, dan SMA (Kompas, 2015). Hak untuk mendapatkan pendidikan ini tidak terbatas pada tingkat kecerdasan dan keadaan fisik anak, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan untuk menjalani pendidikan formal untuk memaksimalkan potensinya. Badan Pusat Statistik melaporkan terdapat 1,6 juta anak berkebutuhan khusus pada tahun 2017 di Indonesia. Dari 1,6 juta anak, sebanyak 18 persen yang mendapatkan layanan melalui pendidikan inklusi dan 115 ribu lainnya menempuh pendidikan di SLB (Maulipaksi, 2017).

Pendidikan yang didapatkan anak berkebutuhan khusus tergolong pada pendidikan khusus. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 32, tercantum bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan reguler pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Satuan pendidikan khusus jalur formal yang

dimaksud meliputi TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014). Rangkaian tingkat pendidikan tersebut berada dalam satu area yang biasa disebut sebagai sekolah luar biasa atau SLB dengan peserta didik yang terdiri atas peserta didik yang tergolong pada kondisi-kondisi seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dan memiliki kelainan lainnya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014). SLB itu sendiri terbagi menjadi 6 (enam) meliputi: SLB-A untuk peserta didik tunanetra, SLB-B untuk peserta didik tunarungu, SLB-C untuk peserta didik tunagrahita, SLB-D untuk peserta didik tunadaksa, SLB-E untuk peserta didik tunalaras, SLB-G untuk peserta didik tunaganda dan autisme (Supriadi dalam Putri, 2016).

Bukan hanya peserta didiknya yang berbeda dari peserta didik pada sekolah pendidikan formal reguler, para pengajarnya juga memerlukan karakter tersendiri yang tidak dimiliki oleh guru-guru sekolah umum (Evivianas dalam Nusantara, 2017). Begitupun menurut Wahyuni (dalam Firmansyah & Widuri, 2014) bahwa guru SLB perlu memiliki ketekunan yang lebih besar dibandingkan dengan profesi guru lainnya, guru SLB harus sangat sabar dalam melayani siswanya, sehingga profesi ini merupakan suatu bentuk pengabdian. Selain itu juga, kesulitan yang sering ditemui oleh guru SLB adalah berbeda-bedanya jenis kebutuhan dan pendekatan pada tiap siswa pada satu kelas, serta adanya guru yang harus mengajar anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dari keahlian yang dimilikinya (Putri, 2016).

Hal-hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 5 (lima) guru SLB di SLB-BC X Bandung, yaitu S (PNS) selaku kepala sekolah, G (honorar) selaku operator dan guru kelas tunarungu, A dan R (honorar) selaku guru kelas tunagrahita, serta D (honorar) selaku guru kesenian dan ekstrakurikuler yang memegang keseluruhan siswa SD hingga SMA. SLB-BC X Bandung merupakan sekolah swasta di bawah pengawasan Diknas yang dikelola oleh Yayasan X. SLB ini telah berdiri sejak 1987 dengan jumlah siswa yang awalnya hanya kurang dari 10 orang. Selama 32 tahun beroperasi, tingkat *turnover* di sekolah ini terbilang sangat rendah. Hanya ada 2 orang guru yang pernah keluar dari sekolah, yang seorang karena mendirikan SLB sendiri, yang kedua karena dimutasi ke sekolah lain.

Dana yang didapat berasal dari yayasan yang bersumber dari pemerintah dan donasi yang tidak menentu baik dari donatur atau orang tua siswa. SLB ini tidak menarik biaya dari orang tua siswa, kecuali bagi yang ingin berdonasi semampunya saja. Fasilitas yang disediakan di SLB ini selain pendidikan formal ialah kegiatan olahraga, kesenian, dan ekstrakurikuler seperti pencak silat, bulu tangkis, *bocce*, gamelan, dan melukis. Beberapa siswa bahkan sempat berhasil mengikuti turnamen bulu tangkis tingkat kota dan *bocce* tingkat nasional di Riau. Pelayanan yang belum tersedia di SLB ini ialah jasa psikolog sehingga baru sebagian kecil siswanya yang sudah didiagnosis secara klinis, selebihnya hanya berdasar pengetahuan dari guru-guru lulusan pendidikan luar biasa. Selain itu belum ada terapis yang khusus menangani siswa di sekolah ini, guru-guru hanya dapat merujuk kepada terapis di Rumah Sakit Al-Islam, itupun tidak semua siswa

mendapatkan penanganan sebab hal tersebut bergantung pada keadaan ekonomi keluarga, sedangkan mayoritas siswa datang dari keluarga menengah ke bawah.

Jumlah guru di SLB tersebut sebanyak 11 orang dengan 8 (delapan) orang berstatus honorer dan 3 (tiga) orang termasuk kepala sekolah sudah berstatus PNS. Setiap gurunya mengajar 4-6 siswa per kelas, kecuali pelajaran kesenian dan olah raga di mana seluruh siswa digabungkan. Sekolah ini memiliki jumlah siswa sebanyak 45 orang yang terdiri atas 35 siswa SD, 7 (tujuh) siswa SMP, dan 3 (tiga) siswa SMA. Meskipun SLB ini dikategorikan sebagai SLB-BC, di dalamnya terdapat juga siswa tunadaksa, autisme, dan tunaganda yang sebenarnya tidak termasuk pada kategori SLB-B ataupun C. Beberapa guru merangkap dua peran diantaranya menjadi staf administrasi, guru kesenian, dan guru olahraga.

Uniknya karakter dan ketunaan masing-masing siswa dalam satu kelas menuntut kemampuan guru-guru untuk menggunakan strategi berbeda-beda untuk tiap siswa, seperti yang disampaikan oleh guru R bahwa dalam satu kelas dirinya mengajar siswa-siswa tunagrahita, tunadaksa, *cerebral palsy*, *cerebral palsy* dengan karakteristik autis, dan *down syndrome*. Begitupun yang dialami oleh guru A yang di kelasnya terdapat siswa tunagrahita, autis, *down syndrome*, dan tunaganda. Pada kelas tunarungu yang dipegang oleh guru G pun ada siswa tunaganda yaitu tunarungu yang disertai tunagrahita, sedangkan guru D yang memegang kelas kesenian sekaligus dengan kelas SMALB berhadapan dengan seluruh siswa. Satu jenis ketunaan bukan berarti karakter siswa-siswa tersebut sama, terlebih lagi dengan ketunaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru-guru bukan hanya dituntut untuk mengerti setiap ketunaan tetapi juga karakter

individual pribadi siswa. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan utama menjadi guru SLB dalam kegiatan belajar-mengajar.

Tantangan lainnya ialah guru-guru setiap hari harus siap berhadapan dengan perilaku anak yang tidak dapat diprediksi seperti tiba-tiba memukul, menendang, atau satu anak menangis dan yang lainnya mengikuti. Guru-guru memaklumi perilaku tersebut karena terkadang perilaku tersebut merupakan suatu bentuk protes sebab sebagian besar siswa tidak dapat mengkomunikasikan keinginannya, hal ini juga membuat guru selalu mencari cara agar keinginan anak bisa ia tangkap. Selain itu, guru-guru perlu terbiasa untuk membersihkan air liur siswa atau berurusan dengan kepentingan defekasi dan miksi karena mereka turut serta mengajarkan *potty training* pada siswa terutama yang masih anak-anak.

Permasalahan lain yang dialami guru-guru adalah tuntutan kurikulum yang tidak realistis. Guru R dan guru A menjelaskan bahwa kurikulum terlalu berfokus terhadap kemampuan akademik, padahal yang lebih dibutuhkan siswa untuk bertahan hidup dan menjadi produktif ialah pendidikan bina diri, sosial, dan vokasional. Salah satu contohnya ialah dalam kurikulum KIKD (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar) bahwa siswa kelas 3 ditugaskan untuk mampu dalam penjumlahan, padahal kenyataannya siswa memang mampu menghafal angka 1-10 namun tidak memahami angka tersebut secara konsep, karena perihal angka-angka dan penjumlahan merupakan sesuatu yang abstrak sedangkan sebagian besar siswa tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Faktanya, di sekolah tersebut siswa tingkat SMP pun belum mampu melakukan penjumlahan. Guru-guru merasa bahwa penyusun kurikulum tidak mempertimbangkan keadaan nyata yang terjadi di sekolah-sekolah luar biasa,

bahwa kemampuan siswa tidak seperti sekolah reguler yang rata-rata sama. Pada akhirnya tuntutan KIKD itupun tidak tercapai, sebab guru-guru lebih memperhatikan dan mengacu pada kemampuan individual siswa-siswa itu sendiri.

Karakter orang tua siswa juga terkadang menjadi penghambat progres pembelajaran yang sudah diusahakan oleh guru dan siswa. Terutama ketika siswa masuk setelah libur sekolah, terlihat bahwa beberapa orang tua kurang melanjutkan pembiasaan yang telah terbentuk di sekolah sehingga guru harus berusaha dari nol lagi. Kejadian yang berulang tersebut membuat guru merasa khawatir sehingga menghubungi orang tua atau wali dari siswa. Sebagian orang tua dapat bekerja sama dan melaksanakan saran yang diberikan guru, tetapi ada juga orang tua yang kurang bersedia untuk bekerja sama sehingga guru perlu melakukan konfrontasi.

Kesulitan-kesulitan yang dialami guru SLB-BC X datang dari berbagai sisi yaitu sejauh mana kemampuan yang mereka miliki untuk berhadapan dengan keunikan siswa-siswa, karakter orang tua, serta kesenjangan kurikulum dan fakta lapangan. Tidak ada perbedaan tugas antara guru yang berstatus PNS dan honorer, namun perbedaan terdapat dari gaji guru honorer yang hanya dalam kisaran 200-800 ribu tergantung dari masa kerja, bahkan guru A menyebutkan bahwa gaji tersebut tidak etis untuk guru SLB. Gaji itu juga masih jauh di bawah UMK Kota Bandung, yang dilansir dari situs berita Detiknews (Solehudin, 2019), yaitu sebesar Rp3.339.580,00. Sementara gaji guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi berkisar tiga juta rupiah. Ditambah lagi, berdasarkan informasi dari guru G yang sudah mengajar sejak tahun 2002, saat ini persyaratan untuk mendapatkan *inpassing* dan sertifikasi guru menjadi lebih sulit dan kompleks.

Berbeda dengan angkatannya dulu, sekarang bukan hanya masa kerja yang menjadi syarat tetapi juga banyak ujian yang harus dilewati jika ingin mendapatkan sertifikasi. Idealnya, guru-guru honorer mengejar sertifikasi agar mendapatkan gaji yang lebih sesuai, tetapi kenyataannya sebanyak 8 guru di SLB-BC X menetap dengan statusnya sebagai guru honorer dari yang masa kerja 4 tahun hingga di atas 20 tahun.

Terdapat beberapa hal yang membuat guru memilih bertahan meskipun dengan keadaan yang telah diuraikan sebelumnya. Salah satu alasan guru senang bekerja di sekolah tersebut karena sekolah itu tidak komersil seperti beberapa sekolah lain. Kepala sekolah menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban membayar SPP bagi orang tua siswa, hanya jika mereka ingin memberikan kontribusi materi pada siswa-siswanya. Lain halnya dengan guru yang menyatakan bahwa itu merupakan suatu peraturan tidak tertulis yang diterapkan oleh kepala sekolah.

Selain itu, minat para guru juga sesuai dengan pekerjaannya di sekolah tersebut. Guru mengatakan bahwa mereka menyukai anak-anak karena tingkahnya yang lucu dan profesinya saat ini memuaskan minat tersebut. Ditambah lagi, sekolah tersebut aktif dalam mengikuti kompetisi bulu tangkis dan *bocce* sehingga satu kali seminggu mereka pergi ke gedung serbaguna di luar sekolah untuk latihan atau sekedar berolah raga. Acara-acara non akademik juga cukup sering diadakan seperti berjalan-jalan ke suatu tempat atau acara penyambutan dan perpisahan guru magang sehingga otomatis guru ikut berpartisipasi. Kegiatan-kegiatan ini menjadi hiburan baik bagi siswa maupun guru. Hal ini membuat guru membandingkan dengan pekerjaan yang sebelumnya mereka pernah jalani.

Guru G pernah mengundurkan diri dan bekerja *full time* di bank, tetapi ia akhirnya kembali ke SLB karena saat itu memang kekurangan tenaga kerja sehingga dirinya dibutuhkan di sekolah. Guru G menyampaikan meskipun gaji di bank lebih besar, selain karena dibutuhkan, ia merasa banyak keuntungan yang didapatkan dengan bekerja di SLB. Keuntungan tersebut seperti keleluasaan dalam mengurus anak dikarenakan kedua anaknya dapat dibawa ke sekolah sambil ia mengurus pekerjaannya.

Selain guru G, guru R pernah bekerja sebagai buruh, dan guru D sebelumnya bekerja sebagai koordinator seni di Hongkong. Guru R dan guru D menyampaikan bahwa walaupun mereka sempat memiliki pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih besar, ada suatu kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan dalam menjadi guru SLB yang membedakannya dari pekerjaan lain. Peraturan yang ketat dan kegiatan yang monoton pada pekerjaan lain yang pernah mereka jalani tersebut membuat rasa jenuh dan lelah sering muncul, sehingga mereka tidak bertahan lama di sana. Hari libur yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan kantoran juga menjadi daya tarik tersendiri dalam bekerja sebagai guru SLB.

Berbeda dengan pekerjaan yang pernah mereka jabani, guru menyatakan bahwa menjadi guru SLB bukanlah sekedar profesi, namun juga bentuk pengabdian. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, hal ini menjadi alasan yang membuat guru memilih untuk tidak berhenti bekerja di SLB-BC X. Guru mengetahui bahwa tidak mudah bagi siswa untuk menyesuaikan diri seandainya ada guru pengganti sebab dapat menghambat proses pembelajaran yang telah dijalani. Bukan hanya itu, SLB-BC X juga masih kekurangan guru dan staf



administrasi, sehingga jika ada satu guru yang berhenti tentu akan menyulitkan pihak sekolah dalam mencari pengganti.

Guru-guru juga memiliki harapan yang membuat mereka masih ingin melanjutkan pekerjaannya. Di ruang kelas guru D tersimpan karya-karya seperti lukisan dan ornamen dari barang bekas. Ada dua lukisan yang pernah ditawarkan seharga 500 ribu dan 2 juta rupiah, namun tidak ia jual karena ia masih membutuhkan lukisan itu untuk pameran yang ingin diadakan nanti. Melalui pameran tersebut guru D ingin memperlihatkan kepada orang lain karya-karya yang dibuat oleh anak dengan disabilitas agar orang awam tidak memandang mereka dengan sebelah mata. Mimpi yang belum terwujud itu membuat guru D mempertahankan pekerjaannya menjadi guru di SLB-BC X.

Sementara itu, guru R dan guru A bercerita bahwa tujuan dan harapan mereka untuk anak-anak penyandang disabilitas ialah agar mereka mendapatkan kelayakan yang sama seperti anak-anak di sekolah reguler dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Mereka memiliki harapan untuk suatu saat dapat membuat program keahlian yang spesifik untuk anak-anak SLB agar ketika mereka lulus sekolah, mereka bisa bekerja.

Penjelasan guru-guru di atas mengarah pada bahasan mengenai komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan kondisi dimana karyawan telah mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan tujuannya, serta berniat untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Robbins & Judge, 2013).

Selain itu, mereka juga meyakini bahwa esensi menjadi guru SLB bukan hanya sekedar pekerjaan melainkan juga bentuk ibadah pada Allah. Oleh karena

itu, guru mengatakan bahwa pekerjaannya merupakan suatu bentuk pengabdian untuk membantu para siswa, di mana hal itu dianggap sebagai sesuatu yang positif baik secara norma maupun agama. Mereka percaya jika mereka bekerja untuk mencari ridha Allah, akan banyak berkah dan pahala yang belum tentu mereka dapatkan di pekerjaan lain. Amal-amal ini akan membawa kebaikan pada mereka hingga sampai kehidupan setelah mati. Guru D menyampaikan bahwa anak-anak SLB yang dijamin masuk surga, kelak dapat menyelamatkan dirinya dan keluarganya di akhirat nanti. Guru D mengakui dirinya lebih rajin dalam beribadah setelah bekerja menjadi guru SLB, hal tersebut merupakan satu dari banyak hal positif yang ia dapat.

Kepercayaan tersebut membuat mereka tidak mengutamakan pekerjaannya untuk semata-mata mencari uang. Mereka yakin bahwa amalan yang mereka lakukan sebagai guru SLB akan membawa kebaikan dan rezeki dari jalan lain. Misalnya kelancaran pemasukan dari pekerjaan sambilan mereka. Pernah pada suatu waktu uang yang mereka miliki tinggal sedikit lalu mereka memberi uang jajan pada siswa-siswa, tetapi uang tidak habis. Hal yang tidak logis tersebut mereka anggap sebagai kehadiran Tuhan dalam kehidupannya.

Pentingnya religiusitas bagi mereka, tercermin dari tak luputnya guru mengajarkan siswa untuk berdo'a, misalnya berdo'a sebelum makan hingga siswa melakukannya sendiri tanpa disuruh terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga mengajarkan siswa untuk melakukan praktik keagamaan setiap hari Jumat yaitu shalat dhuha. Pada penjelasan di atas, hasil wawancara menunjukkan adanya indikasi-indikasi yang merujuk pada *centrality of religiosity*. *Centrality of religiosity* merupakan sentralitas atau arti penting dari makna agama dalam

kepribadian (Huber & Huber, 2012). Dari hasil wawancara, guru menggunakan sudut pandang religius dalam menjalani pekerjaan mereka.

Pemahaman religius yang dimiliki guru membantunya untuk tetap berpikiran positif bekerja di SLB-BC X. Konflik antar rekan kerja merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Terkadang ada rekan kerja yang meminta tolong secara ketus, namun guru mengetahui jika ditanggapi dengan emosional permasalahan itu akan berkelanjutan. Guru honorer juga bercerita bahwa justru guru PNS lebih membebani tugas kepada mereka, apalagi ketika guru PNS sering ada urusan di luar sekolah.

Hal-hal yang mengacu pada komitmen organisasi dan *centrality of religiosity* ini bersama-sama menjadi landasan bertahannya guru-guru honorer di SLB-BC X. Ueda dalam penelitian literatur yang dilakukan oleh Imran, Norasyikin, dan Azelin (2017) menjelaskan bahwa individu menginterpretasikan dan mempraktikkan perannya di tempat kerja sesuai dengan orientasi keagamaan dan kepercayaan yang mereka miliki. Pada kasus ini agama Islam yang dianut oleh guru-guru mempunyai pengaruh terhadap pekerjaan yang mereka jalani, meskipun bukan bekerja pada lembaga religius tetapi secara individual mereka memiliki pemikiran bahwa rejeki akan tetap diatur oleh Tuhan, serta bahwa pekerjaannya merupakan suatu ladang amal yang akan membawa mereka kebaikan pada kehidupannya. Secara normatif, pekerjaan menjadi guru SLB juga sejalan dengan nilai-nilai pada kepercayaan mereka bahwa hal tersebut adalah baik. Selain itu juga sudah terbentuk kelekatan yang mereka rasakan dengan siswa-siswa SLB. Oleh karena itu, guru-guru memiliki keinginan untuk tetap

bertahan meskipun dengan kesulitan-kesulitan dan upah yang sebenarnya tidak setara dengan apa yang mereka abdikan di sekolah tersebut.

Oleh karena itu dari seluruh penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran studi deksriptif komitmen organisasi dan *centrality of religiosity* pada guru honorer SLB-BC X Bandung.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang masalah dan melihat teori yang digunakan, muncul pertanyaan:

- a. Bagaimana gambaran komitmen dan organisasi *centrality of religiosity* pada guru-guru honorer SLB-BC X Bandung?
- b. Komponen manakah dari komitmen organisasi yang paling banyak dimiliki guru-guru honorer SLB-BC X Bandung?
- c. Dimensi apakah dari *centrality of religiosity* yang paling tinggi pada guru-guru honorer SLB-BC X Bandung?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk mengetahui gambaran komitmen organisasi dan *centrality of religiosity* pada guru honorer SLB-BC X Bandung.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data empiris mengenai gambaran komitmen organisasi dan *centrality of religiosity* pada guru honorer SLB-BC X Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran mengenai komitmen organisasi dan *centrality of religiosity* pada guru honorer SLB-BC X Bandung.
- b. Menjadi referensi untuk peneliti lain yang sedang atau akan melakukan penelitian sejenis.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi sekolah yang bersangkutan, memberikan gambaran dari komitmen organisasi dan *centrality of religiosity* yang dimiliki guru honorer SLB-BC X yang bisa digunakan sebagai prediksi *turnover* guru.